

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tolak ukur yang penting untuk menentukan tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab. Otonomi daerah membawa dampak positif bagi daerah yang memiliki potensi sumber daya alam, tetapi tidak demikian dengan daerah yang miskin sumber daya alamnya, yang merupakan salah satu masalah yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten atau Kota pada umumnya adalah terbatasnya dana yang berasal dari daerah sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut, sehingga proses otonomi daerah belum bisa berjalan sebagaimana mestinya (Azis, 1997).

Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kehidupan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggung jawaban kepada masyarakat. Prinsip dasar pemberian otonomi dimaksud berdasarkan atas pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya. Atas dasar ini, maka pemberian otonomi diharapkan pada akhirnya akan lebih memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut (Sumitro,1995) Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan harkat, martabat, kualitas, serta kesejahteraan segenap lapisan

masyarakat. Dalam rangka itu pembangunan harus dipandang sebagai suatu rangkaian proses pertumbuhan yang berjalan secara berkesinambungan untuk mewujudkan tujuan-tujuannya. Pembangunan daerah yang dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, mandiri dan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dengan daerah lain yang lebih maju dan secara agregat meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negara secara adil dan merata.

Sejalan dengan hal tersebut maka keberhasilan pembangunan perekonomian dari satu wilayah dan kinerjanya dapat diamati melalui beberapa indikator makro. Indikator makro tersebut dapat dianalisis melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dapat didefinisikan sebagai penjumlahan nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah/daerah tersebut dalam periode tertentu. Jadi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah yang pengukurannya berdasarkan adanya aktivitas ekonomi di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi daerah berkaitan erat dengan peningkatan produksi barang dan jasa, yang diukur dengan besaran dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan juga sebagai indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam suatu periode tertentu. Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga dapat menggambarkan kemampuan daerah mengelola sumberdaya pembangunan yang dimilikinya, oleh karena itu besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap daerah bervariasi sesuai dengan potensi yang dimiliki dan faktor produksi masing-masing daerah (Sukirno, 1978).

Menurut (Todaro, 1997:105) faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi dari suatu negara atau masyarakat yaitu pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja secara tradisional telah dianggap positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi, artinya semakin banyak angkatan kerja berarti semakin produktif juga tenaga kerja, sedangkan semakin banyak penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestik. Namun demikian semuanya tergantung pada kemampuan sistem perekonomian untuk menyerap dan mempekerjakan tambahan pekerja itu secara produktif.

Menurut Kuncoro (1995:334-358) dalam penyelenggaraan otonomi daerah nantinya dikhawatirkan banyak daerah Kabupaten atau Kota yang tidak mampu membiayai kebutuhan daerahnya. Hal ini dapat dilihat dari kondisi keuangan daerah yang ada selama ini di mana porsi antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan bantuan pusat sangat mencolok sekali bahwa lebih separuh dari jumlah Kabupaten atau Kota di Indonesia memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang minim dalam membelanjai kebutuhan anggaran daerahnya, yaitu di bawah 15% dari total anggaran secara keseluruhan.

Pengeluaran Pemerintah merupakan salah satu instrumen utama kebijakan dalam upaya peningkatan Pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus berupaya secara nyata dan terstruktur untuk menghasilkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang betul-betul mencerminkan kebutuhan riil masyarakat di daerah sesuai dengan potensi masing-masing. Untuk melihat apakah daerah telah siap secara finansial untuk

menyongsong otonomi daerah, antara lain adalah dengan melihat apakah sumber-sumber penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) nya mampu menutup anggaran belanja daerah yang bersangkutan. Disamping itu anggaran belanja pembangunan yang dialokasikan pada program proyek yang langsung menyentuh sektor ekonomi produktif masyarakat akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat (Uppal,1986).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan karena dana ini adalah milik pemerintah daerah sendiri sehingga pemerintah daerah mempunyai wewenang penuh untuk mengelola dana tersebut. Di lain pihak pemerintah daerah juga mempunyai tanggung jawab yang sangat besar terhadap pengelolaan keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena dana itu berasal dari masyarakat daerah setempat yang berhak untuk mendapatkan kembali dana tersebut dalam bentuk pembangunan yang dilaksanakan di daerahnya.

Dari Data yang di ambil dari webside resmi Badan Pusat Statistik (BPS) yang ditulis dalam Buku Kota Kupang Dalam Angka dari tahun 2008-2017 menunjukan bahwa Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Kupang dari tahun ke tahun mengalami Peningkatan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di dapat dari penjumlahan seluruh jenis pendapatan yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu:

1. Pajak Daerah,
2. Retribusi Daerah,

3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Berikut ini adalah Tabel 1.1 yang berisi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang dari Tahun 2008-2017 :

Tabel 1.1
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang (Ribu Rupiah)
Tahun 2008-2017

No.	Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)
1.	2008	27.891.568.000
2.	2009	36.191.439.000
3.	2010	39.010.009.000
4.	2011	47.638.337.000
5.	2012	66.169.375.000
6.	2013	80.729.275.000
7.	2014	113.032.804.000
8.	2015	145.154.792.000
9.	2016	165.449.023.000
10.	2017	229.137.474.000

Sumber BPS Kota Kupang Tahun 2018

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Pada tahun 2008 Pendapatan Asli Daerah (PAD) menghasilkan Rp27.891.568.000, kemudian naik di tahun 2011 sebesar Rp47.638.337.000 kemudian mengalami kenaikan yang cukup signifikan di tahun 2014 sebesar Rp113.032.804.000 dan pada Tahun 2017 sebesar Rp229.137.474.000

Melihat pembangunan ekonomi Kota Kupang telah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan karena diimbangi dengan belanja modal daerah dalam meningkatkan infrastruktur dan prasarana seperti mall, sarana hiburan dan lain-lain sehingga mendorong investor dalam membangun usahanya di Kota

Kupang melalui sektor unggulan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor-sektor Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Lapangan Usaha yaitu:

1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.
2. Pertambangan dan Penggalian.
3. Industri Pengolahan.
4. Pengadaan Listrik dan Gas.
5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang,
6. Kontruksi,
7. Perdagangan Besar, dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor,
8. Transportasi dan Pergudangan,
9. Penyediaan Akomodasi Makanan dan Minuman,
10. Informasi dan Komunikasi,
11. Jasa Keuangan dan Asuransi,
12. Real Estate adalah istilah hukum yang mencakup tanah bersama apapun yang tinggal tetap diatas tanah tersebut, seperti bangunan atau proyek.
13. Jasa Perusahaan,
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial,
15. Jasa Pendidikan,
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan
17. Jasa Lainnya.

Produk Domestik Bruto pada tingkat Nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Penyajian Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dikelompokkan berdasarkan 2 variabel yaitu lapangan usaha dan pengeluaran tapi disini hanya membahas lapangan usahanya saja. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (sektoral/lapangan usaha) dan menurut komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha tertentu atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan nilai tambah tersebut. Produk Domestik Bruto (PDB) maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu. Tetapi disini Penulis hanya akan meneliti tentang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan.

Berikut ini adalah Tabel 1.2 yaitu Tabel Realisasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha dari tahun 2008-2017:

Tabel 1.2
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga
Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kota Kupang (Ribu Rupiah)
Tahun 2008-2017

No.	Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Rp)
1.	2008	1.999.694.530
2.	2009	2.122.332.810
3.	2010	2.296.923.510
4.	2011	9.867.235.800
5.	2012	10.609.469.300
6.	2013	11.373.405.000
7.	2014	12.147.981.000
8.	2015	12.953.368.700
9.	2016	13.826.040.900
10.	2017	14.770.640.800

Sumber BPS Kota Kupang Tahun 2018

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Pada Tahun 2008 sebesar Rp1.999.694.530 kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2012 sebesar Rp10.609.469.300 kemudian terus mengalami kenaikan Pada Tahun 2016 sebesar Rp 13.826.040.900, pada tahun 2017 sebesar Rp14.770.640.800 Peningkatan pada masing-masing sektor membawa dampak yang positif bagi perekonomian daerah terutama memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi daerah secara tegas tercermin di dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan dampak positif dari kebijakan proyek-proyek yang di danai atas prioritas dari Pemerintah Pusat yang selama ini diterima pemerintah daerah dan merupakan sumber pembiayaan terbesar bagi pemerintah daerah.

Pengeluaran Pemerintah (Government expenditure) adalah bagian dari kebijakan fiskal (Sadono Sukirno, 2000) yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalanya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output, maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut (Guritno, 1999) Pengeluaran Pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Dari Buku Kota Kupang Dalam Angka yang diambil dari webside resmi BPS ada 2 Jenis Pengeluaran Pemerintah yaitu:

1. Belanja Tidak Langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang pada umumnya terdiri dari:
 1. Belanja Pegawai
 2. Belanja Bunga
 3. Belanja Subsidi
 4. Belanja Hibah
 5. Belanja Bantuan Sosial
 6. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
 7. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

8. Belanja tidak terduga

2. Belanja Langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah yang terdiri dari:

1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang dan Jasa
3. Belanja Modal

Total dari semua Belanja Pemerintah merupakan Pengeluaran Pemerintah.

Berikut ini adalah Tabel 1.3 menunjukkan Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kota Kupang Tahun 2008-2017:

Tabel 1.3.
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kota Kupang Menurut Jumlah Semua
Jenis Biaya Pengeluaran Pemerintah (Ribu Rupiah) Tahun 2008-2017

No.	Tahun	Total Belanja Pemerintah Kota Kupang (Rp)
1.	2008	476.067.041.000
2.	2009	490.381.591.000
3.	2010	557.613.990.000
4.	2011	592.899.571.000
5.	2012	674.177.752.000
6.	2013	796.472.527.000
7.	2014	902.401.993.000
8.	2015	992.065.739.000
9.	2016	1.173.242.133.000
10.	2017	1.156.827.854.000

Sumber BPS Kota Kupang Tahun 2018

Tabel di atas menunjukkan Pengeluaran Pemerintah di Kota Kupang dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2008 sebesar Rp476.067.041.000 dan pada Tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp796.472.527.000 kemudian terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun

setelahnya hingga pada Tahun 2015 mencapai Rp992.065.739.000 dan pada tahun 2017 sudah mencapai Rp1.156.827.854.000.

Berdasarkan uraian diatas terkait dengan Pendapatan Asli Daerah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Pengeluaran Pemerintah, maka Penulis merasa tertarik untuk meneliti Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang dan menuangkan hasilnya dalam karya ilmiah yang berjudul :

“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Kupang”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan maka perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran umum Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Kupang?
2. Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pengeluaran Pemerintah berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Kupang?
3. Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pengeluaran Pemerintah berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Kupang?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui gambaran umum tentang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Kupang.
2. Untuk mengetahui apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pengeluaran Pemerintah berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Kupang.
3. Untuk mengetahui apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pengeluaran Pemerintah berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Kupang.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Kupang :

1. Bagi Instansi

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan menambah referensi di perpustakaan Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

2. Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam upaya mencari pendekatan dan strategi terbaik dalam melakukan upaya peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),

Pengeluaran Pemerintah secara optimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan juga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi meningkatkan perekonomian masyarakat.

3. Bagi Peneliti Lanjutan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menambah wawasan mengenai ilmu ekonomi yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Juga untuk menjadi bahan referensi bagi Peneliti yang akan datang yang sama berkaitan dengan judul dan lain sebagainya dalam Penelitian ini.